

Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi



Salman ^{1,*}, Muhammad Ikbal ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Mataram, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: salman114@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dari perspektif ekonomi. Kebijakan ini merupakan respons terhadap tekanan fiskal dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas belanja negara. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menelaah bagaimana efisiensi anggaran mempengaruhi stabilitas makroekonomi, alokasi sumber daya, dan kinerja pelayanan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan efisiensi dapat memperbaiki struktur anggaran dan meningkatkan ruang fiskal, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, sistem penganggaran berbasis kinerja, serta akuntabilitas birokrasi. Penelitian ini menyarankan reformasi kelembagaan sebagai syarat utama agar efisiensi anggaran dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Article History

Received 2025-05-07

Revised 2025-05-19

Accepted 2025-05-22

Keywords

Efisiensi Anggaran, Kebijakan Fiskal, Ekonomi Publik, Efektivitas, Anggaran Berbasis Kinerja

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran secara efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Efisiensi anggaran diartikan sebagai upaya mengurangi pemborosan dalam pengeluaran dan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak ekonomi tinggi (Musgrave & Musgrave, 1989). Kebijakan ini semakin relevan di tengah keterbatasan ruang fiskal dan perlambatan ekonomi global yang memaksa pemerintah untuk membuat keputusan alokasi yang lebih selektif dan berbasis pada hasil.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan efisiensi, seperti pengendalian belanja operasional, pengurangan perjalanan dinas, dan penggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan biaya transaksi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan, terutama dalam konteks dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik.

Secara makroekonomi, efisiensi anggaran memberikan peluang untuk menciptakan ruang fiskal yang dapat digunakan dalam membiayai program-program pembangunan prioritas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menggeser fokus belanja dari sektor konsumtif ke belanja modal yang lebih produktif. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan bahwa pengurangan belanja barang sebesar 12% dari tahun sebelumnya menghasilkan peningkatan belanja infrastruktur dan pendidikan, dua sektor yang memiliki efek multiplikasi ekonomi tinggi.

Meski demikian, pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya optimal. Banyak program efisiensi hanya bersifat administratif tanpa analisis yang mendalam terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap outcome pembangunan. Tanpa sistem penganggaran berbasis kinerja yang kuat, efisiensi hanya akan menjadi sekadar penghematan jangka pendek tanpa kontribusi berarti terhadap produktivitas nasional (Stiglitz, 2000).

Di tingkat mikro, efisiensi anggaran berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila dilakukan melalui reformasi kelembagaan dan tata kelola yang baik. Studi Bappenas (2022) menunjukkan bahwa pemangkasan belanja tanpa dasar analisis kinerja seringkali justru menurunkan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, efisiensi harus berbasis pada hasil dan manfaat, bukan semata-mata pengurangan nominal anggaran.

Implementasi efisiensi juga dihadapkan pada tantangan birokrasi. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan pendekatan incremental budgeting, yaitu metode penganggaran berdasarkan tren tahun sebelumnya, yang tidak mempertimbangkan efektivitas atau efisiensi program. Schick (1998) menyatakan bahwa negara berkembang cenderung gagal dalam menerapkan reformasi anggaran jika tidak diikuti dengan perubahan budaya organisasi dan sistem akuntabilitas.

Lebih jauh, transparansi dan evaluasi menjadi kunci dalam menjamin efektivitas kebijakan efisiensi anggaran. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang baik, pemotongan anggaran dapat menjadi kontraproduktif. Perlu adanya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lembaga pengawas dalam mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sebagai penutup, kebijakan efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesehatan fiskal dan memperbaiki kualitas belanja negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi antara perencanaan berbasis kinerja, evaluasi yang komprehensif, serta komitmen reformasi birokrasi yang kuat. Tanpa hal-hal tersebut, efisiensi hanya akan menjadi jargon tanpa dampak ekonomi yang nyata.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran merupakan konsep utama dalam ekonomi sektor publik, yang mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan bahwa efisiensi dalam keuangan publik mencakup dua aspek utama: efisiensi alokatif dan efisiensi teknis. Efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya dialokasikan ke sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial terbesar, sedangkan efisiensi teknis menekankan pada pelaksanaan kegiatan dengan input seminimal mungkin untuk output tertentu.

Efisiensi anggaran juga berkaitan erat dengan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran publik, yang mencakup aspek ekonomi (pengadaan dengan harga wajar), efisiensi (produktivitas), dan efektivitas (pencapaian tujuan) (OECD, 2014). Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menghemat, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Teori Ekonomi Publik Dan Peran Pemerintah

Stiglitz (2000) dalam *Economics of the Public Sector* menekankan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah dalam ekonomi adalah mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengoreksi kegagalan pasar, dan menyediakan barang publik. Namun, dalam praktiknya, intervensi pemerintah tidak selalu efisien karena terjadinya masalah birokrasi, korupsi, atau ketidaktepatan sasaran anggaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang objektif untuk memastikan bahwa belanja pemerintah tidak hanya besar, tetapi juga produktif.

Teori agensi dalam ekonomi publik juga menjelaskan bahwa terdapat potensi principal-agent problem antara pemerintah sebagai pengelola anggaran dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tanpa sistem kontrol dan insentif yang tepat, efisiensi anggaran dapat terganggu oleh kepentingan politis dan birokratis (Mardiasmo, 2009).

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting menjadi pendekatan penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Menurut Schick (1998), sistem ini menekankan pada hubungan antara input, output, dan outcome, serta mengharuskan

pemerintah untuk merancang indikator kinerja yang terukur dalam setiap program anggaran. Implementasi sistem ini dapat mendorong alokasi yang lebih rasional dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Namun demikian, penerapan anggaran berbasis kinerja di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan, data yang terbatas, serta resistensi dari aparatur birokrasi. Indrawati (2021) mencatat bahwa reformasi anggaran di Indonesia membutuhkan waktu dan proses panjang agar mampu mendorong perubahan perilaku birokrasi secara menyeluruh.

Efisiensi Anggaran Dalam Konteks Kebijakan Fiskal

Efisiensi anggaran juga berkaitan erat dengan strategi kebijakan fiskal secara keseluruhan. Dalam situasi tekanan fiskal seperti defisit anggaran atau krisis ekonomi, efisiensi menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Menurut Bappenas (2022), efisiensi anggaran dapat menciptakan fiscal space atau ruang fiskal untuk membiayai program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan RI (2023) menunjukkan bahwa melalui efisiensi pengeluaran operasional, pemerintah dapat mengalihkan dana ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan energi. Namun, kebijakan efisiensi harus dilakukan secara selektif dan berbasis analisis kebutuhan, bukan sekadar pemotongan anggaran secara merata.

Evaluasi Dan Tantangan Implementasi

Tantangan utama dalam penerapan efisiensi anggaran adalah lemahnya evaluasi dan pengawasan. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, kebijakan efisiensi berisiko hanya menjadi formalitas administratif. Menurut OECD (2018), negara yang berhasil menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten adalah negara yang memiliki sistem pelaporan dan audit publik yang transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Hal ini diperparah oleh budaya birokrasi yang cenderung mempertahankan status quo dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip efisiensi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2009).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian dilakukan pada tahun 2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen anggaran pemerintah, laporan Kementerian Keuangan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis untuk menilai relevansi kebijakan efisiensi anggaran terhadap indikator ekonomi makro dan kinerja pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Terhadap Stabilitas Makroekonomi

Efisiensi anggaran memiliki potensi besar dalam memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menekan belanja operasional yang kurang produktif dan mengarahkan anggaran ke sektor strategis, pemerintah dapat menciptakan struktur anggaran yang lebih sehat dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi. Data dari Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dalam pos belanja barang, sementara belanja modal mengalami peningkatan. Kebijakan ini tidak hanya menekan defisit fiskal, tetapi juga memperluas ruang fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi pascapandemi, seperti bantuan sosial dan investasi infrastruktur.

Secara teoritis, penguatan efisiensi anggaran memiliki korelasi langsung dengan stabilitas makroekonomi. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), disiplin fiskal yang diperoleh melalui pengelolaan anggaran yang efisien dapat mencegah ketergantungan pada pembiayaan utang jangka pendek dan menurunkan risiko ketidakstabilan fiskal. Hal ini penting karena defisit anggaran yang tinggi dan tidak terkontrol dapat memicu tekanan

inflasi, melemahkan nilai tukar, dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, pengalihan belanja dari konsumtif ke produktif seperti investasi di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang.

Namun, efektivitas efisiensi anggaran terhadap stabilitas makroekonomi sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran. Belanja yang efisien bukan hanya soal penghematan, tetapi tentang penempatan dana pada pos yang memiliki dampak ekonomi tinggi. Stiglitz (2000) menekankan bahwa efisiensi fiskal harus disertai dengan efektivitas, yakni sejauh mana alokasi anggaran mampu meningkatkan output ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*), efisiensi dapat berujung pada penurunan kualitas layanan publik yang justru berisiko menurunkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas dan berorientasi pada pertumbuhan inklusif.

Efektivitas Terhadap Produktivitas Belanja

Belanja pemerintah yang efisien memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis. Menurut analisis Bappenas (2022), efisiensi anggaran yang tepat sasaran memungkinkan pengalihan dana ke sektor-sektor dengan efek multiplikasi tinggi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi pemerintah di bidang infrastruktur, misalnya, terbukti mampu mendorong konektivitas dan menurunkan biaya logistik, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing nasional. Sementara itu, penguatan anggaran pendidikan dan kesehatan mendukung pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, efektivitas efisiensi belanja sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan. Efisiensi yang hanya berfokus pada pemotongan anggaran tanpa perencanaan strategis justru dapat menghasilkan dampak kontraproduktif. Schick (1998) memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan secara merata dan tanpa analisis berbasis kinerja sering kali mengurangi kemampuan institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Hal ini terutama berisiko pada sektor-sektor esensial seperti kesehatan primer dan pendidikan dasar, di mana pengurangan anggaran dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Untuk itu, perlu diterapkan pendekatan *performance-based budgeting* yang menekankan pada keterkaitan antara input anggaran dan hasil yang dicapai. Mardiasmo (2009) menekankan bahwa evaluasi kinerja anggaran harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan belanja negara. Dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur dan sistem pengawasan yang transparan, pemerintah dapat memastikan bahwa efisiensi tidak hanya berarti penghematan, tetapi juga peningkatan produktivitas. Strategi ini akan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dan memperbaiki kualitas belanja negara secara menyeluruh.

Tantangan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya integrasi antara sistem penganggaran dan sistem evaluasi kinerja. Indrawati (2021) menekankan bahwa banyak instansi pemerintah masih mengandalkan pendekatan *incremental budgeting*, yaitu penganggaran berbasis tren historis tanpa mempertimbangkan hasil dan manfaat yang dihasilkan dari belanja tersebut. Akibatnya, efisiensi yang dicapai hanya bersifat administratif, seperti pengurangan nominal belanja tanpa pertimbangan efektivitas program. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran tidak mencerminkan prioritas pembangunan nasional secara optimal.

Selain itu, budaya birokrasi yang belum adaptif terhadap perubahan juga menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan efisiensi anggaran secara substantif. Menurut Mardiasmo (2009), reformasi anggaran seringkali menghadapi resistensi internal dari aparatur pemerintah yang terbiasa dengan sistem lama dan enggan beralih ke sistem berbasis kinerja. Kurangnya insentif dan penghargaan terhadap inovasi dalam pengelolaan

anggaran turut memperparah situasi ini. Akibatnya, pelaksanaan efisiensi seringkali hanya menjadi kewajiban formal yang tidak diiringi dengan perubahan mendasar dalam tata kelola keuangan negara.

Lebih jauh, tantangan teknis seperti keterbatasan data kinerja, lemahnya kapasitas SDM, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi turut memperumit implementasi kebijakan efisiensi. OECD (2018) mencatat bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memerlukan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara efisien. Tanpa dukungan infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai, kebijakan efisiensi rentan gagal mencapai tujuannya. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sistem penganggaran dan peningkatan kapasitas institusional harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan efisiensi anggaran yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan efisiensi anggaran memiliki kontribusi nyata terhadap kestabilan fiskal dan potensi peningkatan produktivitas belanja negara. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, kebijakan ini harus didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja, reformasi birokrasi, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga pengawas dan memperluas penerapan teknologi digital dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran. Rekomendasi kebijakan yaitu 1.) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran. 2.) Mengintegrasikan indikator kinerja dalam setiap alokasi anggaran. Dan 3.) Memberikan pelatihan teknis kepada aparat pemerintah dalam menyusun anggaran berbasis output.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). *Laporan Kinerja Pembangunan Nasional Tahun 2021*. Jakarta: Bappenas.
- Indrawati, S.M. (2021). *Kebijakan Fiskal dan Tantangan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Junaid, M. T., Kanan, A. T., & Trisnawan, M. R. (2025, January). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kota Tarakan. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 27, No. 1, pp. 124-131).
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kemenkeu.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- OECD. (2014). *Value for Money in Government: Budgeting Practices and Procedures*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2018). *Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Said, S., & Fuada, N. (2025). Analisis Efektivitas, Efisiensi Serta Kemandirian dan Pertumbuhan Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 119-129.
- Schick, A. (1998). Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand's Reforms. *The World Bank Research Observer*, 13(1), 123-131.
- Stiglitz, J.E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Walizi, H., & Kom, S. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(02 Mei), 1707-1718.